

KORUPSI

Lagi, Mantan PPTK Ungkap Skandal

MAMUJU — Mantan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) kantor perwakilan Sulbar di Jakarta, Dudy Wahyudi Noor untuk kali kedua melaporkan skandal yang terjadi di kantor tempatnya pernah mengabdikan 2008 lalu. Dalam pengakuannya di kantor Fajar biro Mamuju, Rabu 19 November lalu, Dudy menyebutkan kalau pada tahun anggaran 2008, Pemprov Sulbar mengucurkan dana sebesar Rp 2,754 miliar untuk membiayai kegiatan operasional dan penyediaan perlengkapan di kantor di Jakarta.

Dudy yang saat itu menjabat sebagai PPTK menemukan adanya masalah tak kala terjadi pembelanjaan atas anggaran itu tanpa sepengetahuannya. Bahkan beberapa kegiatan pengadaan sarana perkantoran juga telah diserahkan ke pihak ketiga. Sayangnya, laporan yang disampaikan ke Inspektorat Sulbar sejak delapan bulan silam hingga saat ini belum ada tindak lanjutnya.

Atas dasar itu, Dudy datang lagi dan menyampaikan curhatnya tersebut ke wartawan. Bahkan dia berencana segera melaporkan dugaan skandal itu ke kepolisian jika inspektorat tetap tidak serius menuntaskan skandal yang dilaporkannya tersebut.

Belakangan upaya Dudy tersebut mendapat dukungan beberapa anggota dewan Sulbar. Dudy sendiri telah dimutasi sejak awal Januari lalu. Saat ini dia menjabat Kasi Investasi dan Analisa Pasar Wisata Internasional pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan dan Pariwisata Sulbar. Sediikitnya dua fraksi DPRD Sulbar menyatakan dukungannya dalam upaya pengungkapan kasus yang dilaporkan Dudy tersebut. Kedua fraksi dimaksud masing-masing Fraksi Sulbar Membangun (FSB) dan Fraksi Pembaharuan (FP) Sulbar.

Bahkan kedua fraksi itu menyetujui jika Dudy segera melaporkan ke kepolisian. "Ini momen yang tepat kalau kejaksaan dan kepolisian mau ngambil peran memperbaiki citra. apalagi dalam persoalan ini, diduga banyak pejabat daerah yang terlibat," ujar Sekretaris Fraksi Sulbar Membangun (FSB) DPRD Sulbar, Amran HB, Kamis 19 November.

Dia menilai skandal yang terjadi pada 2008 silam itu berusaha disembunyikan pihak tertentu. Namun wakil rakyat mulai menaruh curiga lantaran memang mencium ada masalah di kantor perwakilan Sulbar di Jakarta.

Bahkan menurut analisa beberapa anggota DPRD Sulbar, proses penyelewengan anggaran senilai Rp 2,7 miliar itu, diduga kuat melibatkan oknum pejabat teras Sulbar. "Tidak mungkin seorang bendahara berani mencairkan anggaran sebesar itu kalau tidak ada yang memerintahkan. Makanya masalah ini akan menjadi celah untuk mengungkap kasus penyelewengan lain yang masih ditutup-tutupi," tegasnya.

Hal sama disampaikan Sekretaris Fraksi Pembaharuan (FP) DPRD Sulbar, Ajbar Abdul Kadir. Dia menyatakan kesiapan fraksinya mendampingi Dudy, selaku oknum yang membeberkan skandal di kantor perwakilan di Jakarta tersebut. "Kami siap mendampingi Dudy mengawal penuntasan skandal tersebut. Dudy jangan mundur dan segera melaporkan masalah itu ke kepolisian dan kejaksaan," pintanya. (nur)

SIBUK. Panitia masih sibuk menyiapkan pelaksanaan ujian CPNS di Kabupaten Mamuju Utara (Matra) yang direncanakan serentak, Minggu 22 November besok.



HUMAS PEMKAB MATRA

Tes CPNS Tanpa Koordinasi Dewan

MAMUJU — Jadwal pelaksanaan tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) Sulbar dan lima kabupaten jajarannya, Minggu 22 November disoroti anggota DPRD. Mereka menyangkal pelaksanaan ujian tanpa lebih dulu dikordinasikan ke dewan.

Anggota DPRD, Mervie Parasan mengungkapkan kekecewaannya menyusul sikap pemprov yang tidak melibatkan dewan dalam penentuan jadwal tes. "Kita kecewa dengan sikap pemprov tersebut," ujar Mervie Parasan di sela-sela ekpose KUA dan PPAS 2010 di ruang paripurna DPRD, Jumat 20 November.

Selain tidak dikordinasikan ke DPRD, Mervie juga menilai pen-

entuan jadwal tes tersebut, Minggu 22 November itu sepihak. Padahal hari itu sibuk salah satu ajaran keagamaan. Pada hari itu, umat kristiani harus melaksanakan ibadah di gereja. "Itu menyalahi ketentuan undang-undang yang menjamin kebebasan setiap warga menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing," terangnya.

Dia menilai dari 6.800 pendaftar untuk tingkat provinsi dan sekira 3.000-an pendaftar di kabupaten, akan sangat banyak umat kristiani yang harus meninggalkan kewajiban menjalankan ibadah lantaran mengikuti tes CPNS. "Sebaiknya kan BKDD melibatkan dewan agar kita

bisa memberi masukan soal jadwal pelaksanaan tes tersebut," ungkapnya. Sebenarnya menurut dia, anggota dewan sudah pernah menyampaikan hal itu ke Kepala BKDD Sulbar, Thahir Kuraiseng. Dalam agenda yang seharusnya membahas KUA dan PPAS 2010 tersebut, Ketua Sementara DPRD Sulbar, Hamzah Hapati Hasan sempat menyela Mervie dengan menyatakan keputusan soal jadwal tes CPNS sudah tidak mungkin lagi diubah mengingat mepetnya waktu.

Namun secara umum, Hamzah bersepakat dengan Mervie kalau dalam mengambil kebijakan, seharusnya SKPD melibatkan dewan. (nur)

Dewan Warning Pemprov Sulbar

MAMUJU — Draft anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Sulbar 2010 belum juga diserahkan ke DPRD. Kondisi itu mulai dipersoalkan sebagian anggota dewan mengingat waktu yang makin mepet.

Para anggota DPRD tersebut mulai meragukan kualitas pembahasan APBD dimaksud. Seharusnya APBD tersebut segera dibahas. "Sebagian anggota DPRD telah memperingatkan Pemprov Sulbar untuk

segera menyerahkan draft APBD tersebut," demikian wakil Ketua Sementara DPRD Sulbar, Arifin Nurdin, Kamis 19 November.

Kepada Fajar, Arifin Nurdin menyatakan kekhawatiran pengalaman tahun-tahun sebelumnya bakal terulang lagi. Proses pembahasan APBD selalu terlambat.

Dampaknya pembahasan dilakukan dengan terburu-buru dan terakhir APBD kurang maksimal. "Jelas keterlambatan mengkh-

watirkan kita akan pembahasan yang terburu-buru dan kurang berkualitas," tandas Arifin.

Seyogyanya menurut dia, draft APBD sudah harus diserahkan, paling lambat dalam pekan ini. Ini terkait tanggung jawab dewan yang masih harus mempelajari isi draft sebelum dituangkan dalam keputusan. Dengan proses seperti itu, dia berani memastikan pengesahan APBD sulit tercapai Desember mendatang. "Kecuali dengan jalan

pintas, mungkin-mungkin saja," imbuhnya.

Hal senada juga disampaikan anggota DPRD lain, Amran HB. Di kantor Fajar Biro Mamuju, Amran mendesak keseriusan eksekutif merampungkan draft untuk segera diserahkan ke legislatif. Amran yang baru masuk pada periode 2009-2014 mengakui kalau keterlambatan penyerahan draft APBD itu akan berimplikasi pada kualitas pembahasan. (nur)

PENDIDIKAN

ATS Wisuda 42 Alumni

SOROWAKO — Akademi Teknik Sorowako (ATS) mewisuda alumni baru angkatan XVI di Sorowako, beberapa waktu lalu. Sebanyak 42 mahasiswa angkatan 2006 di wisuda pada kesempatan itu.

Turut hadir dalam acara wisuda itu, Koordinator Kopertis Wilayah IX Sulawesi, Muhammad Basri Wello, Sekkab Luwu Timur, A Umar Pangerang, Vice President PT Inco, Cih D Bangun, jajaran Pemkab Luwu Timur serta tokoh masyarakat di Luwu Timur. Acara diawali dengan sambutan dari Direktur ATS, Jasman dan dilanjutkan sambutan perwakilan manajemen PT Inco, Cih D Bangun.

Dalam sambutannya, Jasman mengharapkan ATS bisa menjadi institusi pendidikan vokasi terbaik di kawasan Indonesia Timur. Dengan demikian ATS memiliki daya saing tinggi, baik nasional maupun global.

"Mudah-mudahan ATS dapat terus meningkatkan proses akademik, baik dalam kegiatan belajar mengajar maupun pelayanan akademik lainnya," ujar Jasman.

Sekadar diketahui, ATS berawal dari ISTC (Inco-Sumitomo Technical Training Center) yang didirikan PT Inco Tbk dan Sumitomo Metal Mining pada 1991. Pada 1993, ISTC berubah nama menjadi ATS dan menyelenggarakan program pendidikan Diploma III untuk program studi perawatan dan perbaikan mesin.

Program studi itu kemudian dikembangkan menjadi empat bentuk konsentrasi masing-masing gambar dan desain mekanik, pemeliharaan dan perbaikan mekanik, dan pembuatan suku cadang mesin.

Acara wisuda ditutup dengan penutupan rapat senat terbuka luar biasa dipimpin ketua senat ATS, Jasman. (eka)

Palsukan STNK, "Wartawan" Diringkus

PALOLO — Polres Palopo meringkus pelaku penggelapan kendaraan bermotor dan pemalsuan surat tanda nomor kendaraan (STNK), Andi Syaifuddin, 35 tahun. Belakangan, Syaifuddin juga mengaku sebagai wartawan salah satu media cetak terbitan Palopo.

Namun setelah Polres Palopo melakukan pengecekan status ke wartawan Syaifuddin terungkap kalau pria yang mengaku berasal dari Lombok itu, bukan wartawan benaran. Dia gadungan. Syaifuddin ditangkap di salah satu penginapan Jl. Pongsimpin, Palopo, sekitar pukul 20.40 Wita, Kamis. Dia diduga menggelapkan motor dan memalsukan STNK.

Dari tangan Syaifuddin juga mengaku aktivis LSM, disita beberapa barang bukti berupa tiga lembar kartu tanda penduduk (KTP), kartu identitas wartawan, kartu keanggotaan LSM, STNK motor dan kartu keanggotaan lain yang semuanya diduga kuat paslu. Selain itu, polisi juga menyita satu unit motor, Minerva DD 2593 RA.

Syaifuddin berhasil dibekuk berdasarkan mendapat laporan seorang warga, Akmal yang

mengaku melihat motor temannya yang hilang empat bulan lalu. Motor tersebut terlihat di salah satu wisma yang ada di Palopo.

"Dia memang dikenal tukang tipu, sudah banyak orang yang jadi korban. Teman saya saja sudah empat bulan motornya dipinjamnya dan sampai sekarang belum dikembalikan. Untungnya, secara tidak sengaja saya lihat motor itu di wisma. Jadi saya segera melapor ke polisi," tutur Akmal, warga Jl. Pongsimpin di Mapolres Palopo, Kamis 19 November malam.

Kasat Reskrim Polres Palopo, AKP Aris Buang saat dikonfirmasi, Jumat 20 November mengatakan, Syaifuddin awalnya dicurigai menggelapkan motor. Tapi setelah dikembangkan, ternyata dia juga mengaku wartawan dan memiliki identitas wartawan salah satu media terbitan Palopo. Belakangan setelah polisi melakukan kroscek, nama Syaifuddin ternyata tidak ada dalam daftar nama di media tersebut. "Untuk sementara ini dia diduga menggelapkan motor karena dia menggunakan STNK yang discan dan saat ini masih dikembangkan untuk mengetahui pasal yang dilanggarnya," jelas Aris. (eka)



Pembukaan Porseni

Dalam memeriahkan pembukaan porseni Kabupaten Luwu Utara, digelar tari adat, Kamis 19 November. Masyarakat pun antusias menyaksikan kegiatan seremoni tersebut.

Hasil Seleksi Berkas Diumumkan 23 November

BELOPA — Jika tidak ada aral melintang, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Luwu mengumumkan hasil seleksi berkas penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2009, Senin 23 November lusa. Rencana itu sesuai jadwal sebelumnya.

Kepala BKD Kabupaten Luwu, Syaifullah, Kamis 19 November mengatakan, sampai sekarang panitia penerimaan CPNS masih me-

lakukan seleksi berkas. Seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan semua persyaratan yang telah ditetapkan.

"Insya Allah, seleksi berkas CPNS diumumkan 23 November mendatang," ujar Syaifullah.

Sejalanjutnya, BKD membagikan kartu ujian, 24 November mendatang. Kartu ujian itu menandakan pendaftar CPNS itu telah lulus berkas dan layak

mengikuti tes. CPNS yang dinyatakan tidak lulus berkas tidak akan diperbolehkan mengikuti ujian tertulis, 12 Desember 2009 mendatang.

Selain itu, Syaifullah mengatakan, BKD rencananya menggunakan gedung sekolah untuk pelaksanaan ujian. Saat ini, BKD masih berkoordinasi dengan pihak terkait dengan lokasi ujian tersebut. (eka)

Melihat Desa Pekalao, Lahan Tidur yang Dikelola TNI

Pernah Jadi Lokasi Perambahan Hutan

DESA Pekalao, Kecamatan Towuti, Luwu Timur (Lutim), salah satu wilayah program ketahanan pangan karya bakti TNI. Konon lahan tidur itu pernah menjadi lokasi perambahan hutan.

EKA NUGRAHA
● Palopo

SECARA geografis, Desa Pekalao terletak tidak jauh dari danau Towuti Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur (Lutim). Desa itu, satu dari enam desa yang mengelilingi Danau Towuti tersebut.

Desa tersebut awalnya terkenal sebagai wilayah penghasil kayu di Sulawesi Selatan. Konon, pernah terjadi perambahan hutan besar-besaran yang mengakibatkan wilayah itu menjadi gundul. Wilayahnya yang berbukit dan aliran sungai yang tidak terjangkau membuat warga desa kesulitan untuk memanfaatkan wilayah ini.

Namun hal tersebut menjadi terbalik. Karya bakti TNI yang digelar atas kerja sama Pemkab Lutim dan PT Inco sejak Maret lalu membawa banyak perubahan di desa kecil itu. Bahkan dalam waktu dekat ini, wilayah tersebut bakal menjadi lahan persawahan.

Karya bakti TNI sejak Maret lalu berhasil membangun jaringan irigasi sistem pompa sir tanpa motor (JIS-PATM). Hasilnya, jaringan irigasi senilai sekira Rp 2,3 miliar tersebut dapat menyuplai air ke sekira 1800 hektare sawah tadah hujan.

"Kita targetkan PATM ini bisa menyuplai air ke semua lahan sawah tadah hujan yang ada di sini," ujar Pangdam VII Wirabuana, Mayjed TNI Djoko Susilo Utomo saat menyerahkan JIS PATM ke Pemkab Lutim, Kamis 19 November lalu.

Djoko mengatakan, sejak dikelola TNIAD, wilayah itu ternyata memiliki potensi yang sangat luar biasa. Satu di antaranya, produksi cabe dan sumber ketahanan pangan lain.

Bahkan menurut Pengam, desa tersebut akan dijadikan percontohan di Sulawesi Selatan sebagai wilayah

ketahanan pangan. Tidak hanya itu, Djoko juga meminta warga untuk menjadikan desa tersebut sebagai tempat sekolah pertanian.

"Nanti para babinsa (bintara pembina desa) bisa mendampingi warga mengelola pertanian di tempat tersebut," jelas Djoko.

Tidak hanya itu lanjutnya, dengan adanya JIS PATM, warga juga dapat membuat tenaga listrik alternatif dengan menggunakan turbin air sebagai pembangkitnya. Informasi yang dihimpun dari PT Inco menyebutkan, JIS PATM memiliki debit air sebesar 1,2

sampai 1,5 liter/detik dengan lokasi ketinggian hingga 50 sampai 60 meter. Debit air yang dapat dihasilkan 40 sampai 50 unit JIS PATM tersebut, sekira 200 sampai 250 air/detik. Debit seperti itu dapat menghasilkan tekanan air sampai 10 BAR dan dapat memutar turbin mikro hidro sebesar sekira 20.000 watt.

Selain itu, PT Inco juga melansir petani jagung sekitar juga dapat melakukan dua kali panen dalam setahun. Dengan demikian diperkirakan petani dapat menghasilkan lebih dari 20 juta kilogram jagung dalam satu hektare/tahun. (*)